BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Lampiran Kode No.

Nomor

: SPD/ 13 /XI/KA/RH.03/2023/BNNP

SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

1	Pejabat Pembuat Komitmen	Fajrul Husni, SE	
2	Nama/NIP/NRP Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas	Ayu Wardani, M.Psi. Psikolog NIP. 19890121 201801 2 002	
3	a. Golongan b. Jabatan / Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. III - c b. Psikolog Klinis Ahli Muda	
4	Maksud Perjalanan Dinas	Evaluasi Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di Kelurahan Pemenang Barat Kabupaten Lombok Utara	
5	Alat angkutan yang dipergunakan	Darat	
6	a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	a. Mataram b. Lombok Utara	
7	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba di tempat baru*)	a. Selama 1 (satu) hari kerja terhitung mulai tanggal : b. 16 November 2023 c. 16 November 2023	
8	Pengikut: Nama 1. Hijabul Insan, A.Md.Kep 2 3 4 5	Tanggal Lahir	Keterangan
9	Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Mata Anggaran	Badan Narkotika Nasional Prov. NTB 3260.QDB.001.052.A.524111	
10	Keterangan lain-lain	tend have been a secret session of second segment of the second s	

dikeluarkan di : Mataram

tanggal

November 2023

Pejabat Pembuat Komitmen

Fajrul Husni, SE

Hansa (U. 18	Berangkat dari : Mataram (Tempat Kedudukan) Ke : Lombok Tengah Pada Tanggal : 16 November 2023 Kenala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat
	Gagas Nugraha, SH., SIK., MM., MH
II. Tiba di : Lombok Tengah Pada Tanggal : 16 November 2023	Berangkat dari : Lombok Tengah Ke : Mataram Pada Tanggal : 16 November 2023
III. Tiba di : Pada Tanggal :	Berangkat dari :
IV. Tiba di : Pada Tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :
V. Tiba di : Mataram (Tempat Kedudukan) Pada Tanggal : 16 November 2023 Kepata Badan Narkotika Nasional Proving Nusa Tenggara Barat	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintahnya dan semata mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Pejabat Pembuat Komitmen
Mr.	

PPK yang menerbitkan SPD, Pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat / tiba, serta Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan keuangan negara, apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaannya.